

## BAB II

### PSAK NO. 101 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 47

#### TAHUN 2012 TERHADAP *CORPORATE SOCIAL*

#### *RESPONSIBILITY DISCLOSURE (CSR)*

##### 2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi gambaran dari kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan akan menjadi sumber informasi bagi para pemakainya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai laporan atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manajemen atas pengelolaan perusahaan<sup>28</sup>.

Gibran Ramadhan mengutip Munawir tentang laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.

Harahap mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah merupakan pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 38.

<sup>29</sup> Pengertian Laporan Keuangan dan Menurut Para Ahli, <http://gibran-de-leonardo.blogspot.com/2013/04/pengertian-laporan-keuangan.html>, 03/05/2015.

Laporan keuangan merupakan gambaran mengenai keadaan masa lalu, kini, bahkan dapat dipergunakan untuk memprediksi masa akan mendatang. Dalam menjabarkan setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terdapat keterbatasan dalam laporan keuangan<sup>30</sup>.

Menurut SAK sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah<sup>31</sup>:

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas transaksi yang telah lewat dan tidak dapat menggambarkan secara eksplisit mengenai kejadian yang akan terjadi dimasa akan datang karena laporan keuangan tidak dapat dianggap menjadi satu-satunya informasi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Akuntansi menekankan pada laporan keuangan yang bersifat umum karena dipergunakan oleh banyak pihak, meskipun sebenarnya mempunyai perbedaan kepentingan.
3. Laporan keuangan tidak terlepas dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka pilih alternatif yang menghasilkan laba bersih yang paling kecil.

---

<sup>30</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 21.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 22.

5. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
6. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta tidak dapat mengabaikan kuantifikasi secara umum.

Dari beberapa pengertian laporan keuangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan sebagai bentuk penilaian kinerja dari suatu perusahaan, serta sebagai pertanggungjawaban manajemen atas kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan dana perusahaan.

## 2.2 PSAK No. 101

Laporan keuangan syariah merupakan suatu laporan mengenai keuangan yang terjadi saat ini sebagai pembandingan dengan periode sebelum atau dengan laporan keuangan lainnya. Prinsip universal dalam PSAK 101 terdapat pada ruang lingkup dimana laporan keuangan dapat digunakan untuk kebutuhan bersama bagi semua pihak yang berkepentingan yang melakukan transaksi syariah. Hal ini sesuai dengan PSAK 101 paragraf 4 yaitu SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa lain<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> ED PSAK 101, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Jakarta, 2014, hlm. 13.

### 2.2.1 Perbedaan PSAK No. 101 Tahun 2011 dan 2014

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 101 Tahun 2014 dengan Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Perbedaan antara ED PSAK 101 Tahun 2011 dengan Tahun 2014

Keterangan	ED PSAK 101 (2014)	ED PSAK 101 (2011)
Komponen Laporan Keuangan	<p>Komponen Laporan Keuangan Lengkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan posisi keuangan</li> <li>2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</li> <li>3. Laporan perubahan ekuitas</li> <li>4. Laporan arus kas</li> <li>5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat</li> <li>6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan</li> <li>7. Catatan atas laporan keuangan</li> <li>8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya</li> <li>9. Laporan posisi keuangan pada awal periode</li> </ol>	<p>Komponen Laporan Keuangan Lengkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan posisi keuangan</li> <li>2. Laporan laba rugi komprehensif</li> <li>3. Laporan perubahan ekuitas</li> <li>4. Laporan arus kas</li> <li>5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat</li> <li>6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan</li> <li>7. Catatan atas laporan keuangan</li> <li>8. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif</li> </ol>

	komparatif	
Informasi Komparatif	Menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi komparatif Minimum</li> <li>2. Informasi komparatif tambahan</li> </ol>	Tidak terdapat pengaturan mengenai hal tersebut.
Perubahan nama laporan laba rugi komprehensif	Laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	Laba rugi komprehensif
Perubahan nama pos dalam laporan laba rugi komprehensif	Penghasilan komprehensif	Laba komprehensif
Penyajian penghasilan komprehensif lain	Disajikan berdasarkan kelompok: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</li> <li>2. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</li> </ol>	Disajikan dalam kelompok Penghasilan komprehensif lain.
Pengalokasian Pajak Penghasilan	Pajak penghasilan	Tidak diatur

Atas Komponen Penghasilan Komprehensif Lain Yang Disajikan Secara Bruto	dialokasikan pada: 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
---	--	--

Sumber: ED PSAK 101 (2014:7)

Dari tabel di atas perihal dengan informasi komparatif di tahun 2014 menerangkan bahwa adanya aturan mengenai pelaporan informasi komparatif tambahan yang sebelumnya tidak diatur. Hal tersebut mengalami perubahan artinya bahwa setiap perusahaan harus lebih transparansi mengenai pelaporan keuangan berkaitan dengan peristiwa atau kegiatan karena adanya anggaran yang harus dikeluarkan. Tahun 2014 pun menjelaskan mengenai perubahan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif yang sebelumnya hanya mengenai laporan laba rugi komprehensif.

*Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan seperti bank yang menggunakan anggaran dari beban non operasional. Kegiatan tersebut harus dibuat *report* untuk kepentingan *stakeholder* berupa CSRD. Laporan tersebut secara terperinci dibuat terpisah sesuai dengan ketentuan di atas masuk pada informasi komparatif tambahan, kecuali sumber dana masuk pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena telah menjadi bagian dari beban non operasional perusahaan.

## 2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian atas laporan keuangan dan merupakan gambaran dari kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik<sup>33</sup>.

Beberapa tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syrikah* temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah termasuk penggolongan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf<sup>34</sup>.

Laporan keuangan merupakan bentuk pengambilan keputusan dimasa akan datang, dan bentuk pertanggungjawaban dari manajemen atas amanat yang diberikan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>34</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 93.

### 2.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Perusahaan wajib memiliki informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen atas tugas-tugas yang diberikan untuk mengelola perusahaan.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d. Laporan arus kas selama periode
- e. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode
- g. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain informasi komparatif mengenai periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 yaitu entitas syariah menyajikan minimal dua laporan posisi keuangan dan paragraf 39 yaitu dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan.
- h. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya<sup>35</sup>.

Entitas syariah menyajikan semua laporan keuangan di atas dengan lengkap dan tingkat keutamaan sama<sup>36</sup>. Entitas syariah memberikan laporan terpisah jika substansi belum tercakup pada komponen di atas seperti CSR. Laporan tambahan ini masuk pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan, jika entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosialnya maka tetap harus melaksanakan point e dan f.

<sup>35</sup> ED PSAK 101, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Jakarta, 2014, hlm. 17.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 17.



## 2.2.4 Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Tanggung jawab atas laporan keuangan dilakukan oleh manajemen dengan melakukan penyusunan setiap transaksi dan memberikan penyajian laporan keuangan.

Karakteristik umum dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK
2. Kelangsungan Usaha
3. Dasar Akrtual
4. Materialitas dan Penggabungan
5. Saling Hapus
6. Frekuensi Pelaporan
7. Informasi Komparatif
8. Konsistensi Penyajian<sup>37</sup>

Berikut penjelasan dari kutipan di atas:

1. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK

Penyajian laporan keuangan yang wajar adalah dengan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariah.

Laporan tersebut harus jujur dan relevan berdasarkan peristiwa atau kegiatan yang terjadi. Pengungkapan tambahan merupakan hal yang wajar jika dibutuhkan entitas syariah. Entitas syariah dalam menyajikan laporan keuangan tidak diperkenankan untuk menyebutkan bahwa laporan yang dibuat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali entitas tersebut telah patuh secara keseluruhan terhadap SAK.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 18.

## 2. Kelangsungan Usaha

Manajemen telah memberikan penilaian atas laporan yang disajikan untuk dapat mengasumsikan potensi usaha saat ini atau masa akan datang untuk mengetahui kondisi kelangsungan usaha.

## 3. Dasar Akrua

Entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha.

Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

## 4. Materialitas dan Penggabungan

Laporan keuangan merupakan hasil dari klasifikasi atas peristiwa keuangan yang terjadi dan digabung sesuai dengan sifat yang sama. Pos yang secara individual tidak materil maka dapat digabung dengan pos lain yang serupa, namun pos yang tidak cukup materil maka dibuat secara terpisah.

## 5. Saling Hapus

Saling hapus tidak digunakan entitas syariah dalam pelaporan keuangan atas aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer ekuitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. Saling hapus dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain akan mengurangi pemahaman pengguna laporan keuangan mengenai peristiwa yang terjadi untuk mengetahui keadaan dimasa mendatang.

## 6. Frekuensi Pelaporan

Frekuensi pelaporan entitas syariah setidaknya dilakukan setahun sekali.

## 7. Informasi Komparatif

- a. Informasi Komparatif minimum: entitas syariah menyajikan minimal 2 periode yaitu tahun sebelum dan tahun berjalan.
- b. Informasi Komparatif Tambahan: Entitas syariah dapat menyajikan tambahan atas laporan keuangan minimum. Seperti membuat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif ketiga yaitu tahun sebelum, tahun berjalan dan tambahan.

## 8. Konsistensi Penyajian

Klasifikasi dan penyajian atas laporan keuangan dilakukan secara konsisten.

Entitas syariah harus melaporkan kegiatan transaksinya secara wajar dan sesuai SAK dengan frekuensi satu tahun sekali mengenai kelangsungan usahanya. Menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, penggabungan dilakukan untuk transaksi yang mempunyai sifat yang sama dan tidak terjadi saling hapus karena akan mempengaruhi pengambilan keputusan di masa akan datang. Dan entitas syariah membuat laporan keuangan minimum yaitu penyajian minimal 2 periode dan membuat laporan tambahan terkait dengan kegiatan yang dilakukan diluar komponen laporan keuangan yang utama sebagai lampiran untuk laporan keuangan secara keseluruhan.

### 2.3 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 menetapkan peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas. Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan merupakan subjek hukum untuk melakukan

kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam kegiatannya memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan, perseroan wajib mengalokasikan dana untuk melakukan kegiatan tersebut karena telah ditetapkan aturan dan anggaran tersebut bersumber dari biaya/beban perseroan. Perseroan yang tidak melaksanakan kegiatan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk perseroan yang melaksanakannya maka akan diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang. Tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dibuat dalam bentuk pelaporan sebagai tanggung jawab terhadap RUPS<sup>38</sup>.

### **2.3.1 Maksud Adanya Aturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Maksud dari Peraturan Pemerintah atas tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah untuk meningkatkan kesadaran perseroan untuk melakukan kegiatan tersebut baik di dalam atau pun di luar perseroan tersebut, untuk memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dan menguatkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang usaha Perseroan yang bersangkutan<sup>39</sup>.

## **2.4 *Corporate Social Responsibility (CSR) dan Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)***

### **2.4.1 Konsep tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Konsep CSR masih terus berkembang, penerapan CSR ini dilakukan oleh perusahaan baik secara global, nasional dan lokal. Kegiatan ini tidak hanya

---

<sup>38</sup>Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

<sup>39</sup> *Ibid.*

mengenai keuntungan secara *financial*, namun pada sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemerintah dalam menjalankan kegiatan sosial-ekonomi dapat menjadi penilaian kinerja CSR.

Pada dasarnya CSR berkaitan dengan sisi perilaku perusahaan berupa kebijakan dan program yang dilakukan perusahaan yang menyangkut dua kunci yaitu: “a. *Good Corporate Governance* dan b. *Good Corporate Responsibility*”<sup>40</sup>. Etika bisnis berkaitan dengan sumber daya manusia internal perusahaan seperti jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan alam bekerja. Tanggung jawab diluar perusahaan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan dan hak pemangku lainnya.

#### **2.4.1.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) belum memiliki batasan yang sepadan, sehingga belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi. Menurut Elkington bahwa perusahaan yang baik menjalankan *Triple Bottom Lines* yaitu tidak hanya mengejar keuntungan (*profit*) melainkan juga peduli terhadap lingkungan (*planet*) dan peduli masyarakat (*people*)<sup>41</sup>.

Edi Suharto menambahkan satu garis dari teori sebelumnya *Four Bottom Lines*, yaitu perusahaan menganggarkan dana dari keuntungan (*profit*) untuk

---

<sup>40</sup> Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 3.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 4.

kepedulian terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*)<sup>42</sup>.

Syuhada Mansur mengutip definisi CSR oleh *The World Business Council for Sustainable Development (WBSCD)* mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan para pekerja, keluarga mereka dan komunitas lokal<sup>43</sup>.

Dari beberapa pengertian CSR di atas dapat dikatakan bahwa CSR adalah suatu tindak perusahaan untuk ikut berkontribusi sebagai bentuk perilaku perusahaan kepada internal dan eksternal perusahaan.

#### **2.4.1.2 Four Bottom Lines**

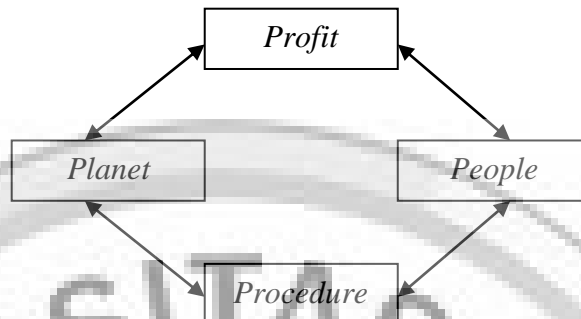
*Corporate Social Responsibility* dikembangkan melakukan konsep *Four Bottom Lines* bahwa perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya tidak hanya mencari keuntungan (*profit*), melainkan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*), kesejahteraan masyarakat (*people*) berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>43</sup> Syuhada Mansur, "Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory", Univesitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm. 26.

**Gambar 2.1**  
**Konsep 4P**



Sumber Edi Suharto (2010:5)

Gambar 2.1 menunjukkan adanya sinergi dari setiap sisi yang akan menimbulkan dampak positif atau pun negatif dari kegiatan yang dilakukan.

Kemudian matriks pada tabel 2.2 memberi gambaran mengenai *framework* audit terhadap program CSR. Aspek-aspek dalam tabel tersebut dikembangkan berdasarkan definisi CSR *Four Bottom Lines*, yaitu perusahaan mengalokasikan dana dari keuntungan (*profit*) untuk kepedulian terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*)<sup>44</sup>.

**Tabel 2.2**  
**Framework Audit Program CSR**

ASPEK	KRITERIA CSR YANG BAIK
<i>Profit</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran sekitar 2% yang disisihkan dari laba bersih perusahaan</li> <li>2. Semakin besarnya perhatian para penentu kebijakan</li> </ol>

<sup>44</sup> Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 128.

	perusahaan terhadap prioritas anggaran CSR
<i>Planet</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program-program nyata pelestarian lingkungan</li> <li>2. Adanya sarana pengelolaan dampak lingkungan</li> <li>3. Adanya program yang berdampak positif bagi lingkungan</li> <li>4. Dampak negatif yang relatif kecil dan terkontrol pada kerusakan lingkungan</li> </ol>
<i>People</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program-program nyata pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Adanya sistem perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan, termasuk penghargaan terhadap kearifan lokal</li> <li>3. Adanya program yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup, mata pencaharian dan kemandirian masyarakat</li> <li>4. Dampak negatif yang terkontrol pada kerusakan sistem sosial</li> </ol>
<i>Procedure</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh lembaga “terpisah” dari perusahaan</li> <li>2. Melibatkan ahli-ahli profesional</li> <li>3. Integrasi CSR dengan kebijakan perusahaan</li> <li>4. Keterlibatan aktif dan dukungan dari pemerintah, LSM dan masyarakat</li> <li>5. Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi</li> </ol>

Sumber: Edi Suharto (2010: 129)

Dari tabel di atas terlihat ketentuan terkait dengan semua kegiatan CSR, salah satunya mengenai anggaran perusahaan untuk mengeluarkan dana CSR yang bersumber dari laba bersih yang artinya dana tersebut telah menjadi biaya atau beban non operasional perusahaan.



### 2.4.1.3 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

*Corporate Social Responsibility* dilakukan karena banyak manfaat bagi perusahaan, sedikitnya ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan:

1. *Brand Differentiation*
2. *Human Resources*
3. *License to Operate*
4. *Risk Management*<sup>45</sup>

Berikut penjelasan dari kutipan di atas:

#### 1. *Brand Differentiation*

CSR bisa memberikan citra baik bagi perusahaan di dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Citra baik dimata publik ini, kemudian akan menjadi *consumer loyalty*.

#### 2. *Human Resources*

Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Dan untuk karyawan lama CSR juga dapat meningkatkan persepsi dan motivasi dalam bekerja.

#### 3. *License to Operate*

Perusahaan yang menjalankan program CSR tentu akan mendapat izin bisnis dari pemerintahan, karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap masyarakat luas.

#### 4. *Risk Management*

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 52.

Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan, dengan CSR reputasi perusahaan dapat membawa *image* yang baik sehingga akan disanjung bahkan mendapatkan penghargaan.

CSR bisa memberikan citra baik bagi perusahaan didalam persaingan pasar yang sangat ketat. Citra baik dimata publik ini, kemudian akan menjadi *consumen loyalty*.

Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Dan untuk karyawan lama CSR juga dapat meningkatkan persepsi dan motivasi dalam bekerja.

Perusahaan yang menjalankan program CSR tentu akan mendapat izin bisnis dari pemerintahan, karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap masyarakat luas.

Dalam penelitian sebelumnya Syuhada Mansur membagi dua manfaat CSR bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, yaitu dari “1. sisi internal dan 2. eksternal”<sup>46</sup>. Berikut ini penjelasannya:

1. Dari sisi internal:

a. Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Untuk itu dibutuhkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab secara sosial.

---

<sup>46</sup> Syuhada Mansur, “*Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*”, Univesitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm. 28.

- b. Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan.
- c. Menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik.
- d. Kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah go public menjadi lebih baik.

2. Dari sisi eksternal:

- a. Penerapan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggungjawaban secara sosial.
- b. CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.
- c. Melaksanakan CSR dan membuka kegiatan CSR secara publik merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan khalayak.

Berdasarkan manfaat CSR di atas dapat dikatakan, kegiatan CSR merupakan reputasi bagi perusahaan untuk mendapat citra baik di mata publik dan juga sebagai bentuk kepatuhan kepada pemerintahan.

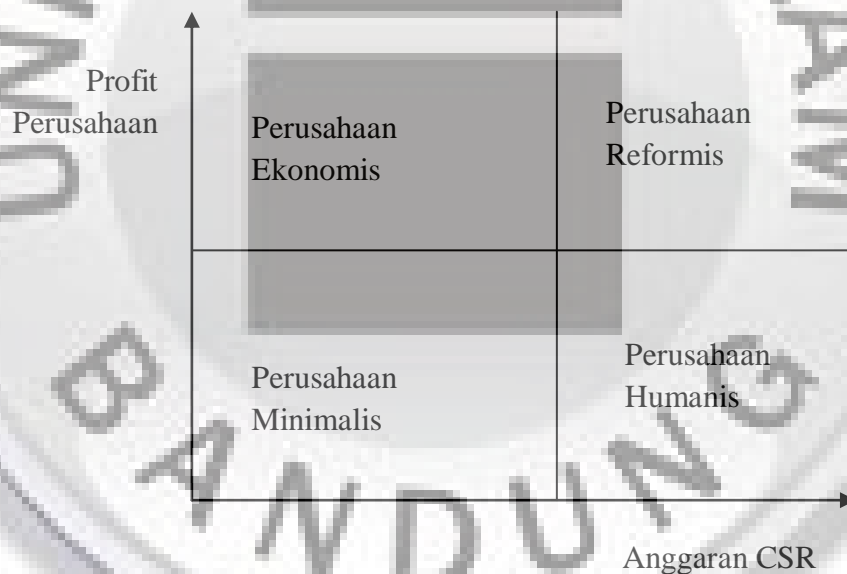
#### **2.4.1.4 Proporsi Keuntungan dan Besarnya Anggaran *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:

1. Perusahaan minimalis  
Perusahaan yang memiliki *profit* dan anggaran CSR yang rendah.
2. Perusahaan ekonomis  
Perusahaan besar yang memiliki *profit* besar, namun anggaran CSR rendah.
3. Perusahaan humanis  
Perusahaan yang memiliki *profit* relatif rendah, tetapi anggaran CSR tinggi.
4. Perusahaan reformis  
Perusahaan yang memiliki *profit* dan anggaran CSR yang tinggi<sup>47</sup>.

Gambar 2.2

Profit Perusahaan dan Anggaran CSR



Sumber: Edi Suharto (2010:41)

Gambar di atas menunjukkan perilaku perusahaan, jika *profit* dan anggaran CSR tinggi maka perusahaan tersebut masuk pada kelompok reformis yang artinya perusahaan tersebut maju. Jika anggaran CSR tinggi tetapi *profit* yang

<sup>47</sup> Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 41.

diterima rendah maka perusahaan tersebut masuk pada kelompok humanis yang artinya perusahaan dermawan. Jika *profit* tinggi tetapi anggaran CSR rendah maka masuk pada kelompok ekonomis yang artinya perusahaan pelit. Dan jika mempunyai *profit* dan anggaran CSR rendah maka perusahaan tersebut masuk pada kelompok minimalis yang artinya lemah atau kecil.

## 2.4.2 Konsep tentang *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR D)*

### 2.4.2.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR D)*

Pada perusahaan, *disclosure* atau pelaporan merupakan bentuk tanggung jawab kepada *stakeholder* atas aktivitas yang telah dilakukan. Hal ini juga berlaku pada aktivitas CSR. Setiap aktivitas CSR harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya (*annual report*) atau dalam media lainnya, seperti web perusahaan. Aktivitas pelaporan ini disebut *CSR Disclosure (CSR D)*.

*CSR Disclosure (CSR D)* sendiri memiliki beberapa pengertian dalam penelitian sebelumnya Fadilla mengutip Meutia bahwa CSR D adalah laporan dengan cara mengomunikasikan mengenai kegiatan yang dilakukan kepada *stakeholder* sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan<sup>48</sup>.

*Perks dalam Douglas mengartikan pelaporan CSR sebagai “[the] disclosure of those costs and benefits that may or may not be quantifiable in money terms arising from economic activities and substantially borne by the community at large or other stakeholders”<sup>49</sup>.*

*Menurut Centre for Corporate Governance (CCG) dalam Barako dan Brown, pelaporan CSR meliputi “... disclose in summary the nature of the enterprise’s social responsibility and corporate citizenship activities,*

<sup>48</sup>Fadilla Purwitasari, “Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 21.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 30.

*environmental, occupational health and safety, and workforce management policies and practices, and whether the enterprise has in place a code of ethics, and the general level of adherence to this code*<sup>50</sup>.

Dari pengertian-pengertian CSRD dapat dikatakan bahwa CSRD adalah komunikasi yang digunakan sebagai bentuk pelaporan kepada *stakeholder* atas kegiatan yang dilakukan.

#### 2.4.2.2 Prinsip *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD)

*Global Reporting Initiative* menekankan pentingnya enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam membuat CSRD yang baik:

- a. *Accuracy*
- b. *Balance*
- c. *Comparability*
- d. *Clarity*
- e. *Reliability*
- f. *Timeliness*<sup>51</sup>

Berikut ini penjelasan dari kutipan di atas:

- a. *Accuracy*

Penyajian laporan harus detail dan lengkap agar dapat dinilai oleh yang berkepentingan secara jelas, tepat dan akurat.

- b. *Balance*

Seimbang yang mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kegiatan CSR yang dilakukan.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>51</sup> Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 132.

c. *Comparability*

Aspek yang digunakan dan dilaporkan harus konsisten sehingga dapat dibandingkan antar waktu.

d. *Clarity*

Pelaporan yang disajikan mudah dipahami dan bisa diakses oleh pemangku kepentingan.

e. *Reliability*

Pelaporan harus konsisten dan terpercaya dengan mengumpulkan, merekam, menganalisis dan menyajikan berdasarkan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

f. *Timeliness*

Laporan dibuat secara reguler dan tersedia tepat waktu bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang memerlukan.

Penyajian CSR (CSR D) dibuat secara detail berdasarkan transaksi dan kegiatan yang terjadi secara nyata dengan memberikan pelaporan yang jelas, tepat dan akurat. Pelaporan harus dibuat secara konsisten agar dapat dibandingkan antar waktu serta penyajian laporan mudah untuk dipahami sehingga pemangku kepentingan dapat menggunakannya.

#### 2.4.2.3 Teori *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR D)*

Perusahaan melakukan atau tidak melakukan (*do or do not engage*) pengungkapan CSR atau CSR D karena perbedaan alasan yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian sebelumnya Fadilla mengutip Belal bahwa

alasan-alasan tersebut dapat dijelaskan menggunakan “1. *Political economy theory*, 2. *Legitimacy theory*, dan 3. *Stakeholder theory*<sup>52</sup>”. Berikut ini penjelasannya:

#### 1. *Political Economy Theory (PET)*

Fadilla mengutip Guthrie dan Parker bahwa *political economy theory* adalah perspektif ekonomi politik memandang laporan akuntansi sebagai dokumen sosial, politik, dan ekonomi. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai alat untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi pengaturan ekonomi dan politik, lembaga, dan tema-tema ideologis yang berkontribusi untuk kepentingan pribadi korporasi. Pengungkapan memiliki kapasitas untuk mengirimkan sosial, politik, dan ekonomi arti untuk satu set pluralistik penerima laporan<sup>53</sup>.

Degan berpendapat bahwa *Political Economy Theory* dapat dilihat dari sudut pandang ‘klasik’ maupun ‘borjuis’. Perspektif klasik sebagai berikut:

*to perceive accounting reports and disclosures as a means of maintaining the favoured position of those who control scarce resources (capital) , and as a means of undermining the position of those without scarce capital. It focuses on the structural conflicts within society*<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup>Fadilla Purwitasari, “Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 31.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 32.



Perspektif borjuis menurut Gray meneliti interaksi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (dengan kata lain, *stakeholder*) dalam sikap yang *neo-pluralistic*<sup>55</sup>.

Aplikasi dari *legitimacy theory* dan *stakeholder theory* dalam pustaka tentang laporan akuntansi, sosial, dan lingkungan secara umum merupakan penjabaran dari pendekatan PET borjuis.

## 2. *Legitimacy Theory*

Menurut Guthrie *legitimacy theory* berasal dari konsep legitimasi organisasi.

Konsep legitimasi organisasi didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer sebagai:

... kondisi atau status yang terjadi ketika sistem nilai suatu entitas yang digunakan sesuai dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih luas yang merupakan entitas bagian. Ketika disparitas, aktual atau potensial, ada antara kedua sistem nilai, ada ancaman bagi entitas legitimasi<sup>56</sup>.

Menurut Degan *legitimacy theory* adalah “kontrak sosial” antara internal perusahaan dengan eksternal perusahaan<sup>57</sup>.

Menurut Hadi *legitimacy theory* adalah sistem perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan kepada masyarakat, pemerintah dan kelompok masyarakat<sup>58</sup>.

Meutia (2010: 78), legitimasi adalah menyamakan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial<sup>59</sup>.

Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengelola legitimasi agar efektif:

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>58</sup> Syuhada Mansur, “Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory”, Univesitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm. 33.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 33.

- a. Melakukan identifikasi dan komunikasi dan dialog dengan publik
- b. Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang perusahaan.
- c. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR<sup>60</sup>.

Dalam konteks ini CSR dipandang sebagai suatu kebijakan yang disetujui antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang telah memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan sumber daya alam dan manusianya serta izin untuk melakukan fungsi produksinya. Jadi dalam pelaporan CSR perusahaan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela. Namun harus diingat bahwa izin tersebut tidaklah tetap sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari perusahaan bergantung pada bagaimana perusahaan secara terus menerus berevolusi dan beradaptasi terhadap perubahan keinginan dan tuntutan dari masyarakat<sup>61</sup>.

### 3. *Stakeholder Theory*

*Stakeholders Theory* (Teori *Stakeholder*), mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholders*. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para *stakeholders* dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi *stakeholders*, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholdersnya*.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 34.

Menurut Thomas dan Andrew, dalam Nor Hadi *Stakeholders Theory* memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok *stakeholders* yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
2. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan *stakeholdersnya*.
3. Kepentingan seluruh legitimasi *stakeholders* memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
4. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan manajerial<sup>62</sup>.

Teori *stakeholder* menjelaskan pengungkapan CSR perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melaksanakan CSR, karena pelaksanaan CSR adalah merupakan bagian dari peran perusahaan ke *stakeholders*. Teori ini jika diterapkan akan mendorong perusahaan melaksanakan CSR. Dengan pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari *stakeholder* dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (*sustainability*)<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 35.